

**PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA TERHADAP
PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL (STUDI PADA
PERUSAHAAN INTELLECTUAL CAPITAL INTENSIVE
INDUSTRIES DI BURSA EFEK INDONESIA)**

Aldafi Salsabilah¹⁾

Wirmie Eka P²⁾

Fitri Mansur³⁾

¹⁾Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2&3)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: aldafisalsabila23@gmail.com¹⁾, wirmie_eka@unja.ac.id²⁾,

fitrinimansur@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study entitled the influence of corporate governance mechanism on intellectual capital disclosure. This study aims to examine the direct and indirect effect of board size, gender diversity, educational background, blockholder ownership, and foreign ownership both simultaneously and partially on intellectual capital disclosure. This study aims to examine the effect of corporate governance mechanism on intellectual capital disclosure. This study used the companies included in intellectual capital intensive industries in Indonesia Stock Exchange as the sample for year 2017-2019. The sampling technique used in this study was purposive sampling, with 243 data from 81 companies. Analysis techniques used in this study were statistic descriptive, multiple regression, used SPSS 23 for windows. The results from hypothesis testing show that simultaneously corporate governance structure influence intellectual capital disclosure (ICD). Partially, only board size influences ICD.

Keywords: board size, gender diversity, educational background, blockholder ownership, and foreign ownership intellectual capital.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pengaruh mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, keberagaman gender, latar belakang pendidikan, kepemilikan *blockholder* dan kepemilikan asing, secara simultan dan parsial terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang termasuk ke dalam high intellectual capital intensive industries di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2017 –2019. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 81 perusahaan, dengan total 243 data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dan analisis regresi berganda menggunakan software SPSS versi 23 for windows. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan mekanisme tata kelola berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Secara

parsial, ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Kata kunci: ukuran dewan komisaris, keberagaman gender, latar pendidikan, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan asing, modal intelektual.

1. PENDAHULUAN

Informasi merupakan hal yang sangat substansial dalam sebuah perusahaan. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi keputusan para pemegang kepentingan. Dalam era *knowledge based economy*, praktik pelaporan keuangan tradisional tidak mencakup faktor-faktor non-finansial di dalam perusahaan (Mulyadi & Panggabean, 2017). Walaupun begitu, laporan keuangan tradisional masih menjadi sumber informasi yang sangat fundamental dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan menyajikan informasi dasar perusahaan yang masih dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan oleh para investor terkait kepercayaan investor terhadap kondisi keuangan saat ini dan di masa yang akan datang (CFA, 2007).

Modal intelektual muncul akibat adanya ‘*gap*’ antara nilai buku perusahaan dengan nilai perusahaan yang ada di pasar, di mana nilai ini disebut juga sebagai *hidden value* (Sardo & Serrasquero, 2016). Akibat adanya ‘*gap*’ tersebut, maka perusahaan haruslah mengungkapkan informasi terkait hal itu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan tradisional (Anifowose, Rashid, & Annuar, 2017). Memasuki era *knowledge-based economy*, pengungkapan informasi modal intelektual menjadi suatu hal yang menarik karena penciptaan nilai perusahaan saat ini cenderung berdasarkan aset tak berwujud (Taliyang & Jusop, 2011).

Walaupun modal intelektual berpotensi untuk meningkatkan nilai perusahaan di pasar serta kinerjanya, namun pelaporan, pengukuran, dan pengelolannya masih menjadi suatu permasalahan (Appuhami & Bhuyan, 2015). Secara garis besar, penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual terdiri dari 2 arus utama: menggunakan pendekatan karakteristik perusahaan dan pendekatan tata kelola perusahaan (Alfraih, 2018). Fungsi monitoring yang diperoleh dari mekanisme tata kelola berpengaruh terhadap keluasan dan kualitas dari pengungkapan sukarela perusahaan (Elshandidy & Neri, 2015).

Di Indonesia, praktik pengungkapan informasi modal intelektual menarik untuk diteliti karena beberapa hal (Suhardjanto & Wardhani, 2010). Pertama, dicanangkannya program pemerintah tentang pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga bisa jadi perusahaan akan memiliki *concern* lebih kepada modal intelektualnya. Kedua, berdasarkan survei Price Waterhouse Coopers dan Taylor&Associates, menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan modal intelektual adalah 5 dari 10 jenis informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Akan tetapi, pada kenyataannya informasi yang berkaitan dengan modal intelektual merupakan informasi yang masih sedikit diungkapkan, sehingga akan terjadi *information gap* antara perusahaan dan pengguna. Terakhir, sebagian besar informasi akuntansi yang diatur berorientasi kepada aset-aset berwujud.

Keterkaitan tata kelola perusahaan dengan SDGs 2030 masuk ke dalam tujuan 16 SDGs yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan serta menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua level. Hal ini menandakan bahwa tujuan ke-16 SDGs tersebut erat kaitannya dengan prinsip-prinsip GCG yang diatur oleh KNKG, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian oleh (Alfraih, 2018) mengenai pengaruh mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan informasi modal intelektual. Hasilnya ditemukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara mekanisme tata kelola perusahaan terhadap banyaknya informasi mengenai modal intelektual yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Alasan replikasi yaitu adanya inkonsistensi hasil penelitian. Penelitian oleh (Pisano, Lepore, & Lamboglia, 2017) menemukan bahwa struktur kepemilikan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Selain itu, (Taliyang & Jusop, 2011) menemukan bahwa ukuran dewan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal

intelektual.

Penelitian oleh (Mulyadi & Panggabean, 2017) menyatakan bahwa penting tidaknya modal intelektual bagi suatu perusahaan tergantung pada jenis industri itu sendiri. Pada perusahaan pertambangan dan manufaktur misalnya, modal fisik masih sangat diandalkan dalam kegiatan bisnisnya. Di Indonesia sendiri, kegiatan ekonomi terbesar masih dimainkan oleh industri primer (bahan mentah) dan sekunder (proses manufaktur).

Fenomena terkait variabel penelitian juga menjadi alasan peneliti ingin melakukan replikasi. Pertama, indeks modal manusia di Indonesia sebagai bagian dari modal intelektual, masih rendah dengan skor 62,19 jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura (World Economic Forum, 2017). Hal ini menandakan bahwa perusahaan di Indonesia masih memiliki *concern* yang rendah pada modal intelektual. Selain itu berdasarkan laporan dari Global Innovation Policy Center (GIPC, 2019), indeks kekayaan intelektual Indonesia berada pada urutan ke-45 dari 50 negara yang diteliti dengan skor 12,87. Apabila dihubungkan ke dalam konteks perusahaan, indikator yang digunakan dalam survei ini masuk ke dalam komponen-komponen modal intelektual. Dibandingkan rata-rata Asia Tenggara sebesar 52,46, Indonesia masih tertinggal jauh.

Pemilihan objek penelitian menggunakan perusahaan yang termasuk dalam *high intellectual capital intensive industries* mempertimbangkan bahwa penting tidaknya modal intelektual sangat tergantung pada jenis industri. Dalam penelitian ini, klasifikasi *high intellectual capital intensive industries* menggunakan penelitian Woodcock (Woodcock & Whiting, 2009). Adanya fenomena bahwa ada perusahaan yang termasuk dalam *high intellectual capital intensive industries* yang melakukan pengurangan jumlah karyawan (CNBC Indonesia, 2019) juga menjadi alasan peneliti mengambil objek perusahaan *high intellectual capital intensive industries*.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

a. Agency Theory

Teori agensi mendefinisikan hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih (yang disebut prinsipal) melibatkan pihak lain (yang disebut agen), untuk mengerjakan beberapa layanan atas nama mereka, termasuk di dalamnya mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen (Dewayanto, 2019). Prinsip utama teori ini adalah hubungan kerja antara pihak prinsipal yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Teori agensi berasumsi bahwa setiap individu memiliki motivasi kepentingannya sendiri, sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Teori agensi menyediakan sebuah kerangka yang menghubungkan antara pengungkapan sukarela dengan tata kelola perusahaan, yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang dihasilkan oleh agen bagi prinsipal untuk mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan yang berasal dari aktivitas monitoring, penggunaan sumber daya, dan kerugian residu (Jensen & Meckling, 1976). Mekanisme tata kelola dirancang untuk mengurangi permasalahan keagenan yang timbul akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen (Li, Pike, & Haniffa, 2008).

b. Signalling Theory

Teori *signaling* (persinyalan), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja tinggi, akan menggunakan informasi keuangan atas kinerja tersebut untuk mengirim sinyal kepada pasar (Spence, 1973). Teori persinyalan sendiri berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengatasi masalah asimetri informasi. Asimetri informasi tersebut dapat dikurangi dengan cara pihak yang memiliki informasi mengirim sinyal kepada pihak yang membutuhkan informasi (Ulum, Salim, & Kurniawati, 2016), di mana sinyal tersebut dapat diamati yang digunakan untuk mengetahui karakteristik pengirim sinyal secara implisit. Salah satu bentuk perusahaan dalam memberikan sinyal kepada investor yaitu dengan cara pengungkapan melalui laporan tahunan perusahaan (Hatane, Angeline, Wedysiage, & Saputra, 2019). Manajer lebih menyukai pengungkapan informasi yang bersifat sukarela untuk menunjukkan mereka lebih unggul daripada perusahaan yang tidak memiliki kapasitas yang bagus dalam hal

kinerjanya, karena perusahaan yang tidak memiliki kapasitas bagus tersebut cenderung hanya mengungkap informasi yang bersifat *mandatory* (Ulum et al., 2016).

c. Resourced-based Theory

Teori *resource-based* berawal dari konsep *resource-based view* oleh Barney pada 1991 yang mengemukakan bahwa sumber daya dan kapabilitas perusahaan merupakan faktor yang penting dalam memahami sumber keunggulan kompetisi perusahaan (J. Barney, 1991). Sumber daya dan kapabilitas yang merupakan aset berwujud dan tak berwujud, seperti kemampuan manajemen, proses organisasi, dan pengetahuan/informasi, dapat membantu perusahaan dalam memilih dan menetapkan strategi (J. B. Barney, Ketchen, & Wright, 2011).

Resource-based theory menjelaskan mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah sumber daya yang dimilikinya yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Teori ini juga menjelaskan mengapa dalam suatu industri yang sama, ada perusahaan yang sukses dan tidak sukses (Mulyono, 2013), yang dinilai berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Asumsi yang mendasari ini adalah bahwa adanya heterogenitas sumber daya perusahaan dan beberapa sumber daya tersebut sulit ditiru.

d. Corporate Governance

Corporate governance didefinisikan oleh FCGI yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002). Lebih lanjut, tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pemilik perusahaan (*shareholders*), yang secara rinci istilah *corporate governance* digunakan untuk menjelaskan peran dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.

Mekanisme tata kelola perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat aturan yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan yang dihadapi perusahaan, yang timbul antara penyedia modal dan manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan (masyarakat, karyawan, mitra bisnis), dan beberapa tipe dari pemegang saham (mayoritas dan minoritas) (Goergen, 2012). Definisi ini sesuai dengan teori agensi yang menjadi landasan dalam menjelaskan mekanisme tata kelola perusahaan, yang dalam penelitian ini menggunakan dimensi asimetri informasi yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dengan pihak agen.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan/pengawasan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap para *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga manajemen lebih terarah dalam mencapai sarannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan tata kelola akan dilihat dari karakteristik dewan komisaris sebagai pemegang fungsi pengawasan perusahaan terhadap dewan direksi (manajemen).

e. Ukuran Dewan

Ukuran dewan dalam penelitian ini diprosikan dengan seberapa banyak komposisi dari dewan komisaris yang ada di perusahaan sebagai pemegang peranan penting dalam perusahaan untuk mewujudkan GCG. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan kepada manajemen. Mengingat manajemen memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, serta dewan komisaris mengawasi manajemen, maka dapat dikatakan bahwa dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (FCGI, 2002).

f. Keberagaman Gender

Keberagaman gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya keterlibatan perempuan dalam jajaran dewan komisaris. Terlibatnya perempuan dalam jajaran dewan dapat berkontribusi dalam peningkatan pengambilan keputusan, memberikan pengalaman dan perspektif yang berbeda dalam peningkatan fungsi tata kelola, dan dapat meningkatkan monitoring terhadap perusahaan (Adams, de Haan, Terjesen, & van Ees, 2015).

g. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan seberapa besar komposisi dewan komisaris yang berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi/ekonomi/keuangan/bisnis. Anggota dewan komisaris di dalam perusahaan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan sejenisnya, dinilai memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola bisnis. Jika salah satu anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/ekonomi/keuangan/bisnis, ada kecenderungan bahwa perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menunjukkan akuntabilitas, meningkatkan citra perusahaan, dan menunjukkan kredibilitas (Haniffa & Cooke, 2002).

h. Kepemilikan *Blockholder*

Kepemilikan *blockholder* didefinisikan sebagai pemilik saham perusahaan yang memegang paling sedikit jumlah saham 5% dari keseluruhan saham perusahaan (Thomsen, Pedersen, & Kvist, 2006). Kepemilikan *blockholder* sebagai alat tata kelola perusahaan, dapat memaksa manajer untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan praktik pengungkapan perusahaan (Alfraih, 2018), yang berimplikasi pada peningkatan kinerja perusahaan di pasar.

i. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dapat didefinisikan sebagai kepemilikan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu atau lembaga terhadap perusahaan yang ada di Indonesia (Rustiarini, 2011). Adanya keterlibatan investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan, akan memberi tekanan yang lebih kepada manajer dalam pengawasan perusahaan (Puspitaningsih, 2016). Apabila kepemilikan asing dimiliki oleh sebuah institusi, yang berarti institusi tersebut sudah berada pada level *multinasional*, akan memiliki pengaruh kepada perusahaan dalam negeri, khususnya pada pertukaran budaya organisasi perusahaan.

j. Pengungkapan Modal Intelektual

Modal intelektual dapat didefinisikan sebagai sumber daya berbasis pengetahuan yang berharga, baik itu *tacit knowledge*, maupun *explicit knowledge* (Subaida & Mardianti, 2018). *Tacit knowledge* merupakan pengetahuan tersembunyi yang dimiliki perusahaan dan sulit untuk ditiru oleh pihak lain. Sedangkan *explicit knowledge* merupakan pengetahuan yang mudah dan dapat ditiru oleh pihak lain. Ada banyak pendapat mengenai komponen-komponen penyusun modal intelektual. (Abeysekera, 2007) berpendapat bahwa komponen penyusun modal intelektual terdiri dari *internal capital*, *external capital*, dan *human capital*. Brooking dalam (Sawarjuwono & Kadir, 2003) menyusun komponen modal intelektual yang terdiri dari: *market assets*, *human-centered assets*, *intellectual property assets*, dan *infrastructure assets*. Akan tetapi, secara umum penelitian mengenai modal intelektual membahas komponen modal intelektual yang terdiri dari *structural capital*, *customer/relational capital*, dan *human capital* (Alfarid, 2017; Gusti & Dwita, 2016; Sudiby & Basuki, 2017).

Pengungkapan menurut (Suwardjono, 2014) merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Akuntansi berkepentingan dengan penyediaan dan penyampaian informasi sebagai komunikasi bisnis sehingga akuntansi dapat juga disebut dengan bahasa bisnis (Gusti & Dwita, 2016). Pengungkapan modal intelektual termasuk dalam pengungkapan sukarela perusahaan, karena pengungkapan jenis ini merupakan inisiatif dari perusahaan untuk mengungkapkan informasi selain dari yang sudah diwajibkan oleh regulator. Pentingnya pengungkapan suatu informasi dalam pelaporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna informasi agar terjalin komunikasi yang baik dengan pihak manajemen (Harisnawati, Ulum, & Syam, 2017).

2.2. Kerangka Penelitian

a. Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Banyaknya anggota di dalam dewan komisaris berpotensi untuk meningkatkan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan perusahaan (He, Mahoney, & Wang, 2009). Ukuran dewan komisaris yang besar dapat meningkatkan kompetitor perusahaan dan meningkatkan performa perusahaan. Akan tetapi, penelitian oleh (Jensen, 1993), menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan efektifitas perusahaan berkurang dikarenakan kompleksnya

koordinasi para anggota. Jensen menyebut bahwa perusahaan dengan ukuran dewan yang kecil, berkinerja lebih baik karena mereka lebih mudah berkoordinasi dan berkomunikasi.

b. Keberagaman Gender Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Adanya keterlibatan perempuan dalam jajaran dewan komisaris berhubungan dengan meningkatnya pengungkapan sukarela, khususnya pengungkapan informasi modal intelektual. Keberagaman anggota dewan komisaris (termasuk keberagaman gender yang ditandai dengan adanya partisipasi perempuan), dapat memberikan beragam kompetensi, pengalaman kepemimpinan yang berbeda, dan kapasitas untuk memunculkan ide baru bagi perusahaan (García, 2016). Adanya keterlibatan perempuan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dikarenakan perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam hal *multitasking*, melihat risiko, dan komunikasi (Schubert, 2006). Selain itu, perempuan juga dapat memberikan pandangan yang berbeda dari laki-laki, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi (Srinidhi, Gul, & Tsui, 2011).

c. Latar Belakang Pendidikan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Tidak ada suatu regulasi yang mengatur bahwa seluruh dewan komisaris harus berasal dari salah satu latar belakang pendidikan tertentu. Akan tetapi, lebih baik anggota dewan komisaris di dalam perusahaan memiliki latar belakang dari ekonomi atau bisnis, dikarenakan setidaknya anggota dewan komisaris tersebut memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola bisnis dikarenakan latar belakang pendidikannya. Dalam pedoman umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), menyebutkan bahwa salah satu dari anggota dewan komisaris di Indonesia harus memiliki latar belakang Pendidikan bisnis atau akuntansi. Komisaris yang memiliki latar belakang Pendidikan dari bisnis atau akuntansi, kinerjanya lebih baik dalam mengelola bisnis dan membuat keputusan bagi perusahaan (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995).

Gagasan mengenai modal intelektual dan perannya dalam meningkatkan keputusan investasi bagi para investor telah membuktikan bahwa nilai dari suatu perusahaan berasal dari modal intelektual (Ferchichi & Paturel, 2013). Hal ini didasarkan dari teori *resource-based*, bahwa semua pengungkapan aktivitas perusahaan yang memasukkan informasi sumber daya termasuk modal intelektual, dapat meningkatkan perhatian para investor (Hatane et al., 2019). Modal intelektual merupakan faktor kunci dari peningkatan kompetisi perusahaan dalam mencapai tujuannya (Petty & Guthrie, 2000), sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.

d. Kepemilikan *Blockholder* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Kepemilikan *blockholder* merupakan kepemilikan saham dengan minimal proporsi sebesar 5%. Kepemilikan *blockholder* dapat berpengaruh kepada pengungkapan informasi di dalam perusahaan, termasuk di dalamnya pengungkapan modal intelektual. Hal ini dikarenakan, pemilik *blockholder* merupakan pemilik yang memiliki hak suara dalam penentuan kebijakan perusahaan. Selain itu, mereka juga mempunyai akses yang lebih kepada manajemen perusahaan dibandingkan pemilik minoritas dan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan.

e. Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Adanya keterlibatan investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan, menjadi peranan penting dalam pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini dikarenakan pemilik asing akan memberi tekanan yang lebih kepada manajer dalam pengawasan (Puspitaningsih, 2016), sehingga manajemen akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih atas tuntutan tersebut. Ditambah lagi jika kepemilikan asing dimiliki oleh institusi, yang berarti sudah berada pada level perusahaan *multinational*, yang mempunyai budaya organisasi yang lebih dan dapat diimplementasikan ke perusahaan yang dimilikinya. Adanya pengaruh dalam kepemilikan asing, dapat mempengaruhi para pengguna laporan perusahaan. Mereka akan cenderung memilih perusahaan yang mempunyai kepemilikan asing untuk mempercayakan dana mereka yang ada di perusahaan (Fitri, Savitri, & L, 2019).

f. Mekanisme Tata Kelola Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Pengungkapan Modal Intelektual

Mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat dapat meningkatkan pengungkapan modal intelektual, sehingga para pemangku kepentingan, khususnya para investor, tertarik untuk membeli saham perusahaan. Jika pembelian saham perusahaan meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkat (Uzliawati & Djati, 2015). Pengungkapan modal intelektual dapat menyediakan suatu

pengawasan pada perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian (Li et al., 2008).

2.3. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.
2. H₂ : Keberagaman gender berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.
3. H₃ : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.
4. H₄ : Kepemilikan *blockholder* berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.
5. H₅ : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari *annual report* masing-masing perusahaan sampel yang diakses melalui website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dari tahun 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam *high intellectual capital intensive industries* di Bursa Efek Indonesia melalui pengklasifikasian yang dilakukan oleh Woodcock (Woodcock & Whiting, 2009). Teknik *sampling* yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan didapatkan sebanyak 81 perusahaan sampel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan, keberagaman gender, latar belakang pendidikan, kepemilikan *blockholder* dan kepemilikan asing. Sedangkan variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual. Pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23. Adapun metode analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \text{PYX}_1 + \text{PYX}_2 + \text{PYX}_3 + \text{PYX}_4 + \text{PYX}_5 + e_1$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Adapun sebelum dilakukannya pengujian tersebut, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4. HASIL

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis untuk uji R², uji F, dan uji t:

Tabel 1. Uji Hipotesis

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,397 ^a | ,158 | ,140 | ,091918 | ,852 |

a. Predictors: (Constant), ForeignOwn, Gender, Education, BlockOwn, BOCSIZE

b. Dependent Variable: ICD

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | ,375 | 5 | ,075 | 8,883 | ,000 ^b |
| | Residual | 2,002 | 237 | ,008 | | |

| | | | | |
|-------|-------|-----|--|--|
| Total | 2,378 | 242 | | |
|-------|-------|-----|--|--|

a. Dependent Variable: ICD

b. Predictors: (Constant), ForeignOwn, Gender, Education, BlockOwn, BOCSIZE

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,532 | ,032 | | 16,703 | ,000 |
| BOCSIZE | ,018 | ,003 | ,399 | 5,757 | ,000 |
| Gender | -,041 | ,037 | -,067 | -1,114 | ,266 |
| Education | ,026 | ,024 | ,067 | 1,087 | ,278 |
| BlockOwn | ,038 | ,035 | ,067 | 1,065 | ,288 |
| ForeignOwn | -,018 | ,022 | -,057 | -,816 | ,415 |

a. Dependent Variable: ICD

Berdasarkan data tersebut, uji R² didapat nilai 14,0, yang berarti mekanisme tata kelola berpengaruh sebesar 14 terhadap pengungkapan modal intelektual, dan sisanya dipenagruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan untuk uji F, diketahui bahwa secara simultan mekanisme tata kelola berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Untuk uji parsial, hanya hubungan X₁ terhadap Y yang terbukti signifikan memiliki pengaruh.

5. PEMBAHASAN

5.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Abeysekera (2010) dan penelitian oleh Alfraih (2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Sesuai dengan teori agensi dan *resource dependence*, ukuran dewan komisaris yang besar dapat mendeteksi lebih jauh permasalahan keagenan, seperti asimetri informasi, karena ukuran yang besar mampu untuk memberikan pengawasan yang besar juga kepada manajemen dan sumber daya perusahaan. Ukuran dewan komisaris dapat menjadi ‘sumber’ bagi perusahaan untuk menginformasikan kepada investor mengenai keunggulannya melalui modal intelektual. Pengungkapan ini dapat mempengaruhi keputusan investor mengenai hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dalam laporan keuangan utama. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jensen (1993), di mana ukuran dewan komisari yang besar dapat menyebabkan efektifitas perusahaan berkurang karena kompleksnya koordinasi antar anggota.

5.2. Pengaruh Keberagaman Gender Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Penelitian Pratiwi, Badera, dan Budiarta (2018) menunjukkan bahwa keberagaman gender dapat saja berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan modal intelektual. Anggota dewan komisaris wanita pada suatu titik tertentu akan cenderung untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusannya yang cenderung menjadi *risk averse*. Pengungkapan modal intelektual yang memberikan informasi mengenai keunggulan perusahaan, dapat saja dianalisis dengan mudah oleh para pesaing sehingga perempuan akan menjadi takut untuk mengungkapkan informasi apa saja mengenai modal intelektual yang harus diungkapkan. Peran wanita dalam mengungkapkan informasi modal intelektual dapat saja tidak ada pengaruhnya akibat kehati-hatian tersebut dan cenderung menggunakan strategi pengungkapan informasi yang lama.

5.3. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jaya dkk. (2016) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Pengungkapan modal intelektual yang bersifat sukarela banyak dipengaruhi oleh faktor lain selain latar belakang pendidikan formal. Latar belakang pendidikan formal juga tidak menjamin bahwa luas pengungkapan

informasi sukarela akan tinggi, dikarenakan berbagai pertimbangan seperti pengalaman non-formal dan strategi bisnis.

Sama seperti variabel gender, dewan komisaris yang berasal dari latar belakang pendidikan terkait bisnis akan sangat berhati-hati dalam mengungkapkan informasi terkait keunggulan perusahaan yang dapat saja 'dicuri' oleh kompetitornya. Akibat sikap ini, perusahaan akan cenderung mengadopsi strategi lama dalam hal pengungkapan informasi, ditambah pengungkapan modal intelektual yang bersifat sukarela tidak diprioritaskan oleh perusahaan.

5.4. Pengaruh Kepemilikan *Blockholder* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Persentase kepemilikan perusahaan yang besar belum tentu dapat mempengaruhi luas pengungkapan modal intelektual. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hindun (2018) dan Wahyuni & Rasmini (2016). Kepemilikan saham *blockholder* dikenal juga kepemilikan saham terkonsentrasi yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham utama. Pemegang saham ini di sisi lain akan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan manajer, sehingga informasi yang mereka perlukan sudah didapatkan terlebih dahulu melalui pihak perusahaan, yang berakibat pada tidak diperdulikannya informasi lain yang vital mengenai perusahaan termasuk informasi modal intelektual. Akibat dari ini, konflik agensi dengan pemegang saham minoritas bisa saja meningkat.

5.5. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Masih rendahnya tingkat kepemilikan asing di perusaah sampel, dapat mempengaruhi bahwa sebenarnya kepemilikan asing maish belum terlalu kuat dalam memberikan kontrol mekanisme tata kelola perusahaan. Selain itu, perbedaan budaya juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemilik asing bingung untuk memutuskan informasi apa saja yang seharusnya diungkapkan mengenai modal intelektual. Ekspektasi yang tinggi dari pemilik asing juga bisa jadi mempengaruhi hasil penelitian ini, di mana pemilik asing memaksa untuk mengungkapkan informasi modal intelektual yang umumnya diadopsi di negara asalnya, sedangkan di Indonesia perusahaan mungkin saja belum siap mengenai modal intelektual tersebut sampai pada tahap pengungkapannya.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan yang termasuk *high intellectual capital intensive industries* di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Ukuran dewan komisaris, keberagaman gender, latar belakang pendidikan, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual dan juga terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang termasuk dalam *high intellectual capital intensive industries* di Bursa Efek Indonesia.
2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan *high intellectual capital intensive industries* di Bursa Efek Indonesia.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak terkait dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para manajer perusahaan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaannya. Selain itu, juga dapat lebih mengungkapkan kembali informasi mengenai modal intelektualnya, dikarenakan rata-rata modal intelektual dalam penelitian ini hanya sekitar 65%. Padahal, perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan yang bergantung pada modal intelektual dalam kegiatan bisnisnya.
2. Bagi pada investor, diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali informasi-informasi yang bersifat kualitatif, termasuk informasi modal intelektual, dan tidak hanya terpaku pada informasi yang bersifat moneter. Informasi kualitatif yang dikeluarkan perusahaan dapat merepresentasikan *sustainability* perusahaan itu sendiri dan bersifat jangka panjang.
3. Bagi para regulator, diharapkan dapat menyusun suatu pedoman khusus mengenai pengungkapan modal intelektual, mengingat pentingnya modal intelektual sebagai *key factor* dalam keberhasilan bisnis suatu perusahaan. Bisa jadi jika ada pedoman yang formal mengenai pengungkapan modal intelektual, perusahaan akan lebih *concern* terhadap modal intelektualnya

dan dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri sehingga dapat menguntungkan juga bagi seluruh *stakeholder* perusahaan.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, terutama terkait dengan isu-isu SDGs 2030. Selain itu, dapat juga mengganti metode pengukuran untuk tiap variabel independen dalam penelitian ini seperti keberagaman gender yang dapat digantikan dengan *Blau Index*, sehingga tiap metode pengukuran tersebut dapat menghasilkan ukuran yang tepat. Selain itu, item-item pengungkapan modal intelektual dapat juga dimodifikasi kembali sehingga bisa menjadi pedoman penelitian dalam pengungkapan modal intelektual selanjutnya. Penelitian selanjutnya juga bisa mempertimbangkan untuk membandingkan hasil antara perusahaan *high intellectual capital intensive industries* dan juga *low intellectual capital intensive industries* di Indonesia.

LAMPIRAN

Item Pengungkapan Modal Intelektual.

| NO. | Klasifikasi | Kode | Deskripsi | Skala | Skor Kumulatif |
|-----|--------------------|------|--|-------|----------------|
| 1 | HUMAN CAPITAL | HC1 | Jumlah Karyawan | 0-2 | 2 |
| 2 | | HC2 | Level Pendidikan | 0-2 | 4 |
| 3 | | HC3 | Kualifikasi Karyawan | 0-2 | 6 |
| 4 | | HC4 | Pengetahuan/Kompetensi Karyawan | 0-1 | 7 |
| 5 | | HC5 | Pendidikan dan Pelatihan | 0-2 | 9 |
| 6 | | HC6 | Turnover Karyawan | 0-2 | 11 |
| 7 | STRUCTURAL CAPITAL | SC1 | Visi Misi | 0-1 | 12 |
| 8 | | SC2 | Kode Etik | 0-1 | 13 |
| 9 | | SC3 | Hak Paten atau Hak Cipta | 0-2 | 15 |
| 10 | | SC4 | Trademarks | 0-2 | 17 |
| 11 | | SC5 | Filosofi Manajemen | 0-1 | 18 |
| 12 | | SC6 | Budaya Organisasi | 0-1 | 19 |
| 13 | | SC7 | Proses Manajemen | 0-1 | 20 |
| 14 | | SC8 | Sistem Informasi dan Jaringan | 0-2 | 22 |
| 15 | | SC9 | Corporate Governance | 0-3 | 25 |
| 16 | | SC10 | Sistem Pelaporan Pelanggaran | 0-1 | 26 |
| 17 | | SC11 | Analisis Kinerja Keuangan Komprehensif | 0-3 | 29 |
| 18 | | SC12 | Kemampuan Membayar Utang | 0-3 | 32 |
| 19 | | SC13 | Struktur Permodalan | 0-3 | 35 |
| 20 | RELATIONAL CAPITAL | RC1 | Brand | 0-1 | 36 |
| 21 | | RC2 | Pelanggan | 0-2 | 38 |
| 22 | | RC3 | Loyalitas Pelanggan | 0-1 | 39 |
| 23 | | RC4 | Nama Perusahaan | 0-1 | 40 |
| 24 | | RC5 | Jaringan Distribusi | 0-2 | 42 |
| 25 | | RC6 | Kolaborasi Bisnis | 0-1 | 43 |
| 26 | | RC7 | Perjanjian Lisensi | 0-3 | 45 |
| 27 | | RC8 | Kontrak-kontrak Menguntungkan | 0-3 | 48 |
| 28 | | RC9 | Perjanjian Franchise | 0-3 | 51 |
| 29 | | RC10 | Penghargaan | 0-2 | 53 |
| 30 | | RC11 | Sertifikasi | 0-1 | 54 |
| 31 | | RC12 | Strategi Pemasaran | 0-1 | 55 |
| 32 | | RC13 | Pangsa Pasar | 0-2 | 57 |

(data dimodifikasi kembali dari Ulum, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. (2007). Intellectual capital accounting: Practices in a developing country. In *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9780203937617>
- Abeysekera, I. (2010). The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(4), 504–518. <https://doi.org/10.1108/14691931011085650>
- Adams, R. B., de Haan, J., Terjesen, S., & van Ees, H. (2015). Board diversity: Moving the field forward. *Corporate Governance: An International Review*, 2(23), 77–82. <https://doi.org/10.1111/corg.12106>
- Alfraih, M. M. (2018). The Role of Corporate Governance in Intellectual Capital Disclosure. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(1), 101–121. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2017-0026>
- Anifowose, M., Rashid, H. M. A., & Annuar, H. A. (2017). Intellectual Capital Disclosure And

- Corporate Market Value: Does Board Diversity Matter? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(3), 369–398. <https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2015-0048> Permanent
- Appuhami, R., & Bhuyan, M. (2015). Examining the influence of corporate governance on intellectual capital efficiency evidence from top service firms in Australia. *Managerial Auditing Journal*, 30(4), 347–372. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2014-1022>
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. (2011). The future of resource-based theory: Revitalization or decline? *Journal of Management*, 37(5), 1299–1315. <https://doi.org/10.1177/0149206310391805>
- CFA. (2007). Comprehensive Business Reporting Model: Financial Reporting for Investors. In *Centre for Financial Market Integrity*.
- CNBC Indonesia. (2019). Wow! Perusahaan RI Juga Banyak PHK Karyawan, Ada Apa? Retrieved December 2, 2019, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191011094921-17-106139/wow-perusahaan-ri-juga-banyak-phk-karyawan-ada-apa>
- Elshandidy, T., & Neri, L. (2015). Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative Evidence from the UK and Italy. *Corporate Governance: An International Review*, 23(4), 331–356. <https://doi.org/10.1111/corg.12095>
- FCGI. (2002). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, II(2002), 37.
- Ferchichi, J., & Paturel, R. (2013). The Effect of Intellectual Capital Disclosure on the Value Creation: An Empirical Study Using Tunisian Annual Reports. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v3i1.3238>
- Fitri, E. R., Savitri, E., & L, A. A. (2019). Influence of Foreign Ownership , Ownership Concentrated , and Environmental Disclosure to Firm Value. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 1(2), 91–96. <https://doi.org/10.31258/ijesh.1.2.91-96>
- García, C. Q. (2016). Impact of female managers on high-technology firms going public:The mediating effect of patents and product development. *European Research on Management and Business Economics*, 22(2), 63–69. <https://doi.org/10.1016/j.iedee.2015.10.003>
- GIPC. (2019). *U.S Chamber International IP Index*. United State of America.
- Goergen, M. (2012). International Corporate Governance. In *Pearson Education Limited*. England: Pearson Education.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77. <https://doi.org/10.1108/09513579510146996>
- Gusti, A. K., & Dwita, S. (2016). Analisis Pengungkapan Intellectual Capital Dalam Laporan Tahunan PT United Tractor Tbk dan PT Intraco Penta Tbk Tahun 2012-2014. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 793–812. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/7222/5668>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. *Abacus*, 38(3), 317–349. <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112>
- Harisnawati, R., Ulum, I., & Syam, D. (2017). Pengaruh Intellectual Capital Performance Terhadap Intensitas Pelaporan Modal Intelektual. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 941–950. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i1.08>
- Hatane, S. E., Angeline, C. O., Wedysiage, M., & Saputra, V. T. (2019). Intellectual Capital Disclosure and Firm Value: Does Jokowi's Era Matter? *Advances in Economics, Business, and*

- Management Research*, 69, 80–86. <https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.15>
- He, J., Mahoney, J. T., & Wang, H. C. (2009). Firm capability, corporate governance and competitive behaviour: a multi-theoretic framework. *International Journal of Strategic Change Management*, 4(1), 293–318. <https://doi.org/10.1504/ijscm.2009.031408>
- Hindun, D. (2018). Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Jaya, T. E., Septiarni, T., & Arafat, Y. (2016). Educational Background of the Board of Commissioners , Leverage , Profitability and Voluntary Disclosure. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), 260–271. Retrieved from https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_tk16-084__260-271_.pdf
- Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48(3), 831–880. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 302–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2), 137–159. <https://doi.org/10.1080/00014788.2008.9663326>
- Mulyadi, M. S., & Panggabean, R. R. (2017). Intellectual capital reporting: Case study of high intellectual capital corporations in Indonesia. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.1504/IJLIC.2017.080638>
- Mulyono, F. (2013). Sumber Daya Perusahaan Dalam Teori Resource-based View. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 9(1), 59–78. Retrieved from <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/434>
- Petty, R., & Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review :Measurement, reporting and management. *Journal of Intellectual Capital*, 1(2), 155–17. <https://doi.org/10.1108/14691930010348731>
- Pisano, S., Lepore, L., & Lamboglia, R. (2017). Corporate disclosure of human capital via LinkedIn and ownership structure An empirical analysis of European companies. *Journal of Intellectual Capital*, 18(1), 102–127. <https://doi.org/10.1108/JIC-01-2016-0016>
- Pramelasari, Y. M. (2010). *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Pasar dan Kinerja Keuangan Perusahaan*. Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, I. A. I. V., Badera, I. D. N., & Budiarta, I. K. (2018). Kemampuan Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Diversitas Gender, Kebangsaan, Pengalaman Dewan pada Luas Intellectual Capital Disclosure. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(2), 543–574.
- Puspitaningsih, R. W. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 3(1), 95–120. <https://doi.org/10.25105/jmat.v3i1.4966>
- Rustiarini, N. I. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2652>
- Sardo, F., & Serrasquero, Z. (2016). A European Empirical Study of The Relationship Between Firms's Intellectual Capital, Financial Performance and Market Value. *Journal of Intellectual Capital*, (Unit 07), 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIC-10-2016-0105>

- Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. (2003). Intellectual Capital : Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan (Sebuah Library Research). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 35–57. <https://doi.org/10.9744/jak.5.1.pp.%2035-57>
- Schubert, R. (2006). Analyzing and managing risks – on the importance of gender differences in risk attitudes. *Managerial Finance*, 32(9), 706–715. <https://doi.org/10.1108/03074350610681925>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Srinidhi, B., Gul, F. A., & Tsui, J. (2011). Female directors and earnings quality. *Contemporary Accounting Research*, 28(5), 1610–1644. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01071.x>
- Subaida, I., & Mardianti, N. E. (2018). Effect Of Intellectual Capital And Intellectual Capital Disclosure On Firm Value. *Journal of Applied Management*, 16(1), 125–135. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2018.016.01.15>
- Sudibyo, A. A., & Basuki, B. (2017). Intellectual capital disclosure determinants and its effects on the market capitalization : evidence from Indonesian listed companies. *SHS Web of Conferences*, 34, 1–7. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173407001>
- Suhardjanto, D., & Wardhani, M. (2010). Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 14(1), 71–85.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Laporan Keuangan* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Taliyang, S. M., & Jusop, M. (2011). Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure: Evidence in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 6(12), 109–117. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n12p109>
- Thomsen, S., Pedersen, T., & Kvist, H. K. (2006). Blockholder ownership: Effects on firm value in market and control based governance systems. *Journal of Corporate Finance*, 12(2), 246–269. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.03.001>
- Ulum, I. (2015). Intellectual Capital Disclosure : Suatu Analisis Dengan Four Way Numerical Coding System. *Jaai*, 19(1), 39–50. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art4>
- Ulum, I., Salim, T. F. A., & Kurniawati, E. T. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Modal Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i1.4395>
- Uzliawati, L., & Djati, K. (2015). Intellectual capital disclosure, corporate governance structure and firm value in Indonesian banking industry. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 8(2), 162–177. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2015.070780>
- Wahyuni, M. A., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance pada Pengungkapan Modal Intelektual. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 21(1), 48–59.
- Woodcock, J., & Whiting, R. H. (2009). Intellectual Capital Disclosures by Australian Companies. *Journal of Economic*, 1–31. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10523/1562>
- World Economic Forum. (2017). *The Global Human Capital Report*.